



REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014 - 2019



BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MADIUN

Jl. Pahlawan No.31 Madiun
Telp. 0351-464151 Fax. 0351-457580

www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga pada saatnya Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun dapat menyusun dokumen Review Rencana Strategis Tahun 2014–2019, yang berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Penyusunan Dokumen Review Rencana Strategi ini sebagai upaya penyempurnaan atas dokumen Renstra Tahun 2014-2019 yang mendasar pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019, yang memuat 5 (lima) misi utama serta arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam tahun 2014-2019.

Review Renstra ini telah memperhatikan ketentuan yang ada dan akan digunakan sebagai acuan atas pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil Madiun yang dijabarkan dalam dokumen Renja tiap tahun.

Dengan disusunnya dokumen review Renstra ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja Bakorwil Madiun secara berkelanjutan.

Madiun, 14 Januari 2016

KEPALA BAKORWIL MADIUN



Dr. GATHOT HENDRO PRIYONO

Pembina Utama Madya
NIP. 19571121 198509 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 3 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD | 5 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bakorwil Madiun | 5 |
| 2.2 Sumber Daya Bakorwil Madiun..... | 9 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun | 11 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... | 14 |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 18 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bakorwil Madiun. | 18 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur Jawa Timur | 18 |
| 3.3 Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.... | 19 |
| 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis | 21 |
| BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN | 24 |
| 4.1 Visi dan Misi | 24 |
| 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 25 |
| 4.3 Strategi dan Kebijakan | 26 |
| BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF | 28 |
| BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 33 |
| BAB VII PENUTUP | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusun Rencana Strategis Bakorwil Madiun Tahun 2014–2019, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2014–2019. Penyusunan Renstra Bakorwil Madiun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019.

Mendasar Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang maka SKPD dapat melakukan review Renstra sesuai dengan ketentuan yang ada.

Review Renstra sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan dokumen Review Renstra Bakorwil Madiun berpedoman pada prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Dengan dokumen review renstra tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam setiap penyusunan Renja–SKPD secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2014–2019 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- i. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Review Renstra Bakorwil Madiun adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur ke dalam perencanaan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun.

Tujuan Renstra yang disusun oleh Bakorwil Madiun ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur yang bersifat indikatif.

Renstra juga merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra ini maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju. Dengan demikian diharapkan penyusunan Renstra ini dijadikan sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Bakorwil Madiun untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Gubernur Jawa Timur yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan misi organisasi dan sebagai pedoman dan kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014–2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Review Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2014–2019 disusun dengan tata urutan penulisan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 40 ayat (5) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra. Dalam bab ini juga disajikan tata urutan penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, berisi uraian tentang struktur organisasi Bakorwil Madiun, tugas pokok dan fungsinya, serta wilayah kerja Bakorwil Madiun. Bab ini juga dilengkapi dengan data-data tentang sumber daya organisasi, kinerja yang telah diraih oleh Bakorwil Madiun pada era sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, yang berisi gambaran tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, dan program Gubernur Jawa Timur, serta penentuan isu-isu strategis yang ada di wilayah kerja Bakorwil Madiun.

- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN** berisi tentang pernyataan visi dan misi yang akan diwujudkan oleh Bakorwil Madiun, tujuan dan sasaran jangka menengah Bakorwil Madiun, serta strategi dan kebijakan yang akan dilakukan.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**, berisi tentang uraian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**, berisi tentang indikator kinerja Bakorwil Madiun yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang termaktub dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014–2019.
- BAB VII PENUTUP**, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bakorwil Madiun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bakorwil Madiun

Bakorwil Madiun adalah salah satu di antara 4 (empat) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan keberadaannya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur, yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur.

Ditinjau dari segi kewilayahan maka keberadaan dan peran Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan cukup strategis dalam membantu Gubernur Jawa Timur melaksanakan proses penyelenggaraan pembangunan dan melaksanakan program-program di wilayah Jawa Timur.

Wilayah kerja Bakorwil Madiun meliputi 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar dan Kabupaten Blitar yang luas keseluruhannya mencapai 11.101,13 km².

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Bakorwil Madiun memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan organisasi Bakorwil Madiun terdiri dari seorang Kepala Bakorwil yang dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) bidang yang mempunyai fungsi yaitu:

(1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap tugas pemerintahan umum, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan umum, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta otonomi daerah;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pemerintahan umum, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta otonomi daerah dan memfasilitasi perumusan penyelesaiannya;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Bidang Pemerintahan dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan yang terdiri dari:

1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;

2. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Linmas.

(3) Bidang Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, BUMD, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Perhubungan serta pengembangan dunia usaha;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, BUMD, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Perhubungan serta pengembangan dunia usaha;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pembangunan ekonomi, dan memfasilitasi perumusan penyelesaiannya;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari:

1. Sub Bidang Perekonomian;
2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

(4) Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang kemasyarakatan dan memfasilitasi perumusan penyelesaiannya;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

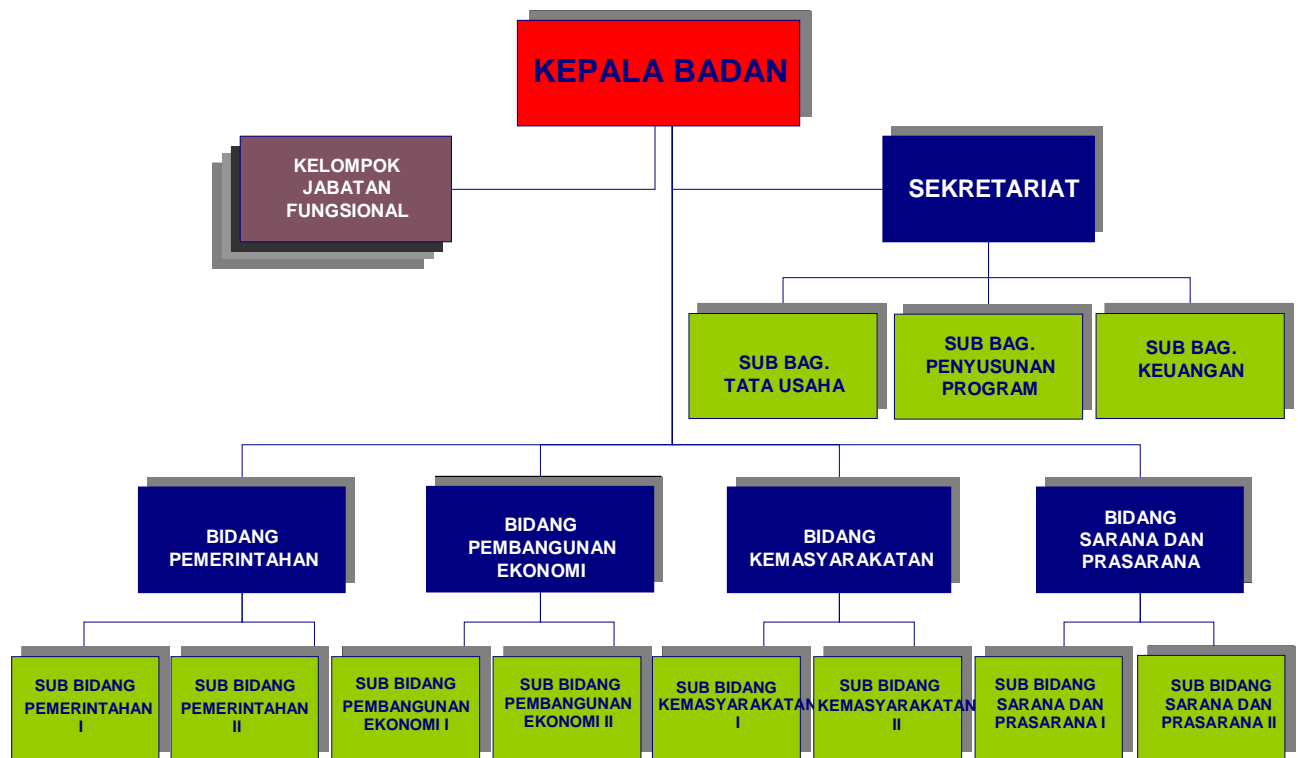
Kepala Bidang Kemasyarakatan dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemasyarakatan yang terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. Sub Bidang Sosial Budaya.

(5) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang prasarana sumber daya air, prasarana perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan pengembangan wilayah, sumber alam dan lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral;
- b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana sumber daya air, prasarana perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan pengembangan wilayah, sumber alam dan lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang sarana dan prasarana serta memfasilitasi perumusan penyelesaiannya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan yang diusulkan oleh kabupaten dan kota ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Lingkungan Hidup
 2. Sub Bidang Fisik dan Prasarana

Untuk lebih jelasnya, berikut susunan organisasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun:



2.2 Sumber Daya Bakorwil Madiun

Bakorwil Madiun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, sampai pada akhir bulan Desember 2015 keadaan pegawai, prasarana dan sarana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadaan Pegawai

- 1) Jumlah pejabat struktural dan staf Bakorwil Madiun adalah 69 orang, yang terdiri dari:

| | | | |
|-------------------------------|---|----|-------|
| Pejabat Struktural Eselon II | : | 1 | orang |
| Pejabat Struktural Eselon III | : | 5 | orang |
| Pejabat Struktural Eselon IV | : | 11 | orang |
| Staf | : | 52 | orang |
| Jumlah | : | 69 | orang |

- 2) Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan:

| | | | |
|--------------|---|----|-------|
| Golongan I | : | 3 | orang |
| Golongan II | : | 25 | orang |
| Golongan III | : | 30 | orang |
| Golongan IV | : | 9 | orang |
| Jumlah | : | 69 | orang |

- 3) Jumlah pegawai berdasarkan Jenis kelamin :
- | | | | |
|-----------|---|----|-------|
| Laki-laki | : | 51 | orang |
| Perempuan | : | 15 | orang |
| Jumlah | : | 66 | orang |
- 4) Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan :
- | | | | |
|-----------------|---|----|-------|
| a. Pascasarjana | : | 6 | orang |
| b. Sarjana | : | 21 | orang |
| c. Diploma | : | 3 | orang |
| d. SLTA | : | 36 | orang |
| e. SLTP | : | 3 | orang |
| f. SD | : | - | orang |
| Jumlah | : | 69 | orang |

Berdasarkan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan, maka jumlah kebutuhan Pegawai Bakorwil Madiun sebanyak 79 pegawai, sehingga keadaan pegawai masih kurang sebanyak 10 pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Bakorwil Madiun adalah sebagai berikut :

- 1) Bangunan dan tanah :
- | | | | |
|---|---|--------|----------------|
| a. Tanah | : | 19.289 | m ² |
| b. Bangunan gedung kantor | : | 1.930 | m ² |
| c. Bangunan gedung Dipenda | : | 455 | m ² |
| d. Bangunan pendopo rumah dinas jabatan | : | 1.344 | m ² |
| e. Bangunan Masjid kantor | : | 64 | m ² |
| f. Lapangan tenis | : | 2.000 | m ² |
| g. Gudang kantor lama | : | 72 | m ² |
| h. Bangunan pos jaga dan paseban | : | 37 | m ² |
| i. Bangunan garasi | : | 190 | m ² |
| j. Bangunan rumah dinas | : | 606 | m ² |
- 2) Kendaraan kantor :
- | | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| a. Kendaraan bermotor | : | | |
|-----------------------|---|--|--|

- roda empat atau lebih : 14 buah
 - b. Kendaraan bermotor
 - roda dua : 15 buah
- 3) Mesin / peralatan perkantoran :
 - a. Mesin ketik manual : 6 buah
 - b. Mesin ketik elektronik : 1 buah
 - c. Mesin komputer : 30 buah
 - d. Notebook : 10 buah
- 4) Mebelair dan peralatan kantor lainnya :
 - a. Almari besi / kayu : 28 buah
 - b. Meja tulis / rapat : 130 buah
 - c. Meja kursi tamu : 15 buah
 - d. Kursi kerja / rapat : 260 buah
 - e. Brankas : 1 buah
 - e. Overhead projector/infra : 3 buah
 - f. Mesin hitung manual : 5 buah
 - g. Faximile : 2 buah
 - h. Telepon : 12 buah
- 5) Sarana lain - lain :
 - a. AC : 34 buah
 - b. Lemari es : 7 buah
 - c. Video kamera : 4 buah
 - d. TV : 14 buah
 - e. Sound sistem : 3 buah
 - f. Kamera Photo : 6 buah
 - g. Tandon air : 3 buah
 - h. Mesin pompa air : 5 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun

Pencapaian kinerja pelayanan Bakorwil Madiun tahun 2009–2014, dapat dijelaskan dalam tabel evaluasi yang disajikan berikut ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bakorwil Madiun
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Jumlah koordinasi pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Pencapaian kinerja pelayanan Bakorwil Madiun tahun 2009–2014 telah terlaksana dengan baik dan lancar melalui kegiatan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bakorwil Madiun
 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Pegawai) | 2.642.345.000 | 3.233.965.871 | 3.627.398.665 | 3.921.917.000 | 4.138.494.000 | 2.210.995.410 | 3.100.086.054 | 3.395.149.262 | 3.741.577.489 | 3.879.700.266 | 83,67 | 95,86 | 93,60 | 95,40 | 93,75 | 426.524.000 | 2,52% |
| BELANJA LANGSUNG | 4.703.762.700 | 5.385.060.000 | 5.061.000.000 | 5.114.836.000 | 6.547.836.000 | 4.071.006.809 | 5.014.326.172 | 4.787.039.521 | 4.954.667.382 | 6.221.615.777 | 86,55 | 93,12 | 94,59 | 96,87 | 95,02 | 137.024.433 | 2,12% |

Jumlah anggaran berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung tiap tahun mengalami kenaikan dan realisasi penyerapan anggaran juga mengalami kenaikan, hal ini dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun terutama untuk kegiatan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeritahan dan pembangunan di wilayah kerjanya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Permasalahan

Beberapa hal yang menjadi permasalahan bagi Bakorwil Madiun dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hubungan hirarki antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal.

Dengan adanya kondisi tersebut, untuk mengoptimalkan dukungan Kabupaten/Kota dalam mencapai target-target sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019 tidak dapat dilaksanakan sistem komando atau *top down*, namun lebih pada upaya koordinasi dan fasilitasi, dorongan serta kerjasama dengan Kabupaten/Kota.

b. Adanya potensi konflik antar Daerah Kabupaten/Kota

Potensi konflik yang mungkin terjadi antar Kabupaten/Kota utamanya di wilayah perbatasan, diperlukan upaya mediasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengeliminir bahkan menghilangkan sama sekali potensi konflik dimaksud. Pada tataran ini, maka Bakorwil sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah menjadi signifikan.

c. Adanya potensi persaingan antar Kabupaten/Kota (Disparitas Wilayah)

Potensi persaingan antar Kabupaten/Kota akan berdampak terjadinya ketimpangan antar daerah yang dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan termasuk kerawanan sosial. Kondisi ini dapat dieliminir antara lain melalui kerjasama kewilayahan yang bersinergi dan saling menguntungkan. Kerjasama kewilayahan yang telah dirintis perlu dan dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota terkait, telah terbentuk kerjasama kewilayahan pada sektor-sektor antara lain pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan.

d. Belum optimalnya dukungan Kabupaten/Kota terhadap program Provinsi.

Sejalan dengan isu strategis pertama sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mengoptimalkan dukungan Kabupaten/Kota terhadap program provinsi perlu dioptimalkan upaya koordinasi dan fasilitasi, dorongan serta kerjasama dengan Kabupaten/Kota oleh Bakorwil di wilayah masing-masing.

e. Belum optimalnya sinergitas Pembangunan Daerah secara regional.

Kondisi pembangunan Kabupaten/Kota saat ini masih dihadapkan permasalahan pembangunan antara lain: (1) Pemerataan pembangunan ekonomi yang belum merata yang diindikasikan dengan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan antar wilayah; dan (2) Belum mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah.

Dalam kaitan ini, sinergitas Pembangunan Daerah secara regional khususnya di wilayah Bakorwil Madiun perlu dioptimalkan melalui implementasi fasilitasi, mediasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar-wilayah yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, mewujudkan kelestarian lingkungan, pengembangan kawasan agropolitan Wilis, kawasan agropolitan Kelud, dan JLS.

f. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan tercapainya visi Jawa Timur lebih sejahtera, berkeadilan, Mandiri, Berdaya saing, dan berakhlak dengan misi Makin mandiri dan sejahtera bersama Wong Cilik, dibutuhkan sinergitas perencanaan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan adanya perencanaan yang mantap terutama sinergitas perencanaan antar SKPD Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota sehingga tercipta perencanaan yang sinergi yang didukung oleh data-data yang akurat dan merupakan kebutuhan riil daerah. Oleh karenanya sistem perencanaan yang antara lain pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi dan dilaksanakan di masing-masing Bakorwil perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, antara lain melalui pelibatan seluruh stakeholder Kabupaten/Kota terkait.

g. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan data kewilayahan.

Bakorwil Provinsi Jawa Timur memiliki kedekatan dengan Kabupaten/Kota dilihat dari sisi lokasi maupun hubungan emosional. Kedekatan ini akan memberi peluang lebih awal kepada Bakorwil Provinsi Jawa Timur untuk dapat memperoleh dan mengelola data yang akurat dari masing-masing Kabupaten/Kota, baik yang diperoleh pada saat koordinasi, monitoring termasuk peninjauan lapangan dan

event-event lainnya yang dilakukan oleh Bakorwil Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota.

Kondisi saat ini, Bakorwil Provinsi Jawa Timur belum secara optimal dapat menyediakan data-data dalam konteks kewilayahan yang dapat dimanfaatkan secara internal maupun eksternal termasuk pemanfaatan oleh lingkup SKPD Provinsi Jawa Timur sebagai alat kontrol, evaluasi rencana pembangunan maupun data untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Hal-hal yang dilakukan kedepan adalah Bakorwil Provinsi Jawa Timur lebih mengoptimalkan pengumpulan dan pengolahan data yang berasal dari Kabupaten/Kota se Wilayah Bakorwil Provinsi Jawa Timur yang diperoleh pada saat koordinasi, Monitoring termasuk peninjauan lapangan dan event-event lainnya.

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan program, perlu memanfaatkan berbagai *peluang* yang ada yang berasal dari faktor eksternal Bakorwil Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- Adanya respon dan kepercayaan yang baik dari Pemda Kab/Kota di Wilayah Bakorwil Provinsi Jawa Timur;
 - Adanya dukungan dari SKPD Provinsi Jawa Timur dalam menunjang program kegiatan Bakorwil Provinsi Jawa Timur;
 - Adanya kerjasama dengan SKPD Provinsi, perguruan tinggi, pakar/praktisi, LSM sebagai mitra kerja koordinasi, pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
2. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Analisis lingkungan strategis secara eksternal maupun internal pada Bakorwil Madiun yang berpengaruh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Adanya dukungan perhatian dari Gubernur terhadap eksistensi Bakorwil;
- Adanya kepercayaan dari DPRD Provinsi;
- Bentangan tugas yang cukup luas khususnya sebagai perekat hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

- Adanya dukungan positif yang kuat dari SKPD-SKPD Provinsi Jawa Timur.
- b. Ancaman
- Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan Bakorwil;
 - Kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia yang belum kondusif;
 - Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang Good Government dan Clean Government;
 - Image dan kepercayaan yang rendah dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap eksistensi Bakorwil.
2. Lingkungan Internal
- a. Kekuatan
- Adanya mandat yang jelas dari Gubernur untuk melaksanakan Tupoksi Bakorwil;
 - Memiliki visi dan misi Bakorwil yang jelas untuk melaksanakan mandat dari Gubernur;
 - Memiliki jaringan kerja yang kondusif dalam pelaksanaan tugas
 - Kinerja organisasi yang cukup baik;
- b. Kelemahan
- Kompetensi SDM belum proporsional dan profesional ;
 - Metode/mekanisme kerja organisasi masih belum optimal dikarenakan kurang memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tupoksi.
 - Terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bakorwil;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bakorwil Madiun

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bakorwil sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur maka Terdapat beberapa Permasalahan Pembangunan dalam urusan "Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian" sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penerapan tata kelola pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik;
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;
3. Kurangnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur Jawa Timur

Pasca pemilu kepala daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 telah memiliki Gubernur dan wakil Gubernur yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk periode 2014-2019. Pada periode masa jabatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan visinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yaitu ***Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak*** dengan Misi ***Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik***. Oleh karena itu, Bakorwil Madiun selaku SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah dengan tupoksi melaksanakan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, maka seluruh kebijakan, program dan kegiatannya harus di buat untuk turut mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut. Untuk mendorong visi dan misi Gubenur Jawa Timur maka sasaran yang menjadi

garapan Bakorwil Madiun adalah meningkatkan mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan di wilayah kerjanya, dengan fokus misi ke-4 yaitu **meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik**.

Dengan demikian seluruh potensi sumberdaya lingkungan strategik internal Bakorwil Madiun baik yang berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki didayagunakan secara optimal untuk mendukung percepatan terwujudnya Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dituangkan pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tupoksi Bakorwil Madiun.

3.3 Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

- Potensi bencana di Bakorwil Madiun memberikan efek dan dampak terkait pertumbuhan dan investasi di wilayah Bakorwil Madiun, sehingga perlu upaya mitigasi bencana kedalam perencanaan tata ruang.
- Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
Perlu perlindungan terhadap lahan pertanian dalam rangka mempertahankan luasan lahan sawah irigasi dan non irigasi untuk menunjang kebutuhan akan pangan sehingga tidak terjadi (pengetatan) alih fungsi pada lahan pertanian.
- Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
Perlu keterpaduan dan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Bakorwil Madiun melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan dimana pembangunan kawasan perkotaan menjadi distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sector lainnya
- Belum optimalnya peran kawasan strategis di Bakorwil Madiun.
Pemantapan peran dan fungsi Kawasan Strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan dan pemerataan wilayah di Bakorwil Madiun diperlukan pengembangan kawasan yang meliputi:

1. Cluster Agropolitan Wilis yang terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan serta Nganjuk;
2. Cluster Regional Kelud berfungsi sebagai pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar;
3. Lintas batas daerah antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI. Yogyakarta terhadap kesepakatan kerjasama antar daerah meliputi beberapa bidang pertanian, perkebunan, kesehatan, pariwisata, pendidikan, ketertiban dan keamanan, dan infrastruktur dan sebagainya. (Karisma Pawirogo, Pawonsari, Golek Pawon, Ngadipono).

Permasalahan-permasalahan tata ruang wilayah di Bakorwil Madiun tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dan penanganan yang tepat agar dalam pengembangan tata ruang wilayah bisa terlaksana sesuai dengan arah, maksud dan tujuan yang telah ditentukan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat kegiatan di wilayah, saluran irigasi baik sekunder maupun tersier, waduk, DAM, embung, pasar rakyat dan sebagainya dibutuhkan untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan dan pemerataan daerah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dan peningkatan surplus hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan (perluasan penciptaan kawasan agropolitan, minapolitan dan agroindustri) terutama disekitar kawasan Wilis dan Kelud serta Jalur Lintas Selatan yang merupakan jalur strategis.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu Strategis KLHS di wilayah Bakorwil Madiun diantaranya terkait dengan pengelolaan hutan, lahan dan sumber air, permasalahan pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan, masih adanya lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan, masih adanya gangguan kawasan hutan, belum optimalnya informasi geologi dalam rangka mitigasi bencana geologi,

konservasi air tanah, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air, terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan PETI, efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, potensi energi terbarukan cukup besar pengembangan energi panas bumi masih mengalami beberapa kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi gas bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisa, permasalahan yang diangkat oleh Bakorwil Madun adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi Bidang Pemerintahan. Permasalahan Bidang Pemerintahan diantaranya berupa:
 - a. Rawan terjadinya bencana alam di daerah terutama banjir, longsor, kekeringan, angit puting beliung;
 - b. Masih adanya permasalahan batas wilayah;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah;
 - d. Terjadinya perselisihan ormas Perguruan Pencak Silat pada saat tradisi tahunan hari besar keagamaan (Suran Agung, halal bi halal, dsb);
 - e. Rawan terjadinya permasalahan tentang ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat dan penegakan Perda;
 - f. Belum optimalnya penanganan kerjasama antar daerah baik antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi maupun Luar Provinsi.
2. Kurangnya koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi Bidang Kemasyarakatan. Permasalahan Bidang Kemasyarakatan diantaranya berupa:
 - a. Lambatnya laju penurunan angka kemiskinan dan jumlah masyarakat miskin;
 - b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan terutama angka kematian ibu dan anak, penanganan gizi buruk dan Pencegahan dari penularan serta pengobatan kasus HIV/AIDS;
 - c. Belum adanya Keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan dan kesejahteraan perempuan;

- d. Masih tingginya angka pengangguran terbuka yang belum seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan;
 - e. Belum optimalnya penanganan PMKS terutama Anjal, gelandangan, WTS, pengemis dan gelandangan psikotik;
 - f. Belum optimalnya penanganan kualitas pendidikan terutama masih adanya siswa putus sekolah (Wajar dikmen 12 tahun) dan masih adanya penduduk buta aksara serta perlunya penyetaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;
 - g. Belum optimalnya program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN);
 - h. Belum efektifnya program Raskin terutama tepat sasaran (RTSM), tepat kuantitas, tepat administrasi dan tepat pembayaran.
3. Kurangnya koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana. Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana diantaranya berupa :
- a. Belum optimalnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
 - b. Kurang optimalnya pengembangan pemanfaatan energi panas bumi
 - c. Kurangnya perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, waduk, DAM dan bendungan
 - d. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pencemaran air dan pengolahan limbah
 - e. Belum seimbang penyediaan Ruang Terbuka Hijau
 - f. Ketidak serasian RTRW provinsi dan Kabupaten baik dari segi perencanaan dan aplikasinya
 - g. Belum optimalnya penanganan lahan kritis
4. Kurangnya koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi Bidang Pembangunan Ekonomi. Permasalahan Bidang Pembangunan Ekonomi diantaranya berupa:
- a. Kurangnya penanganan investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing;
 - b. Pengembangan agropolitan yang hanya berbasis pada produk pertanian
 - c. Masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian maupun hutan;
 - d. Belum optimalnya penanganan permodalan Koperasi dan UMKM;
 - e. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu daerah perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah belum optimal;

- f. Lambat dan kurangnya pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - g. Terjadinya kerusakan hutan dan rendahnya pendapatan masyarakat sekitar hutan;
 - h. Akses pasar produk industri kecil menengah belum optimal;
 - i. Banyaknya kerusakan dan kurang memadainya infrastruktur pertanian (jaringan irigasi tingkat usaha tani, jalan usaha tani);
 - j. Lemahnya pengawasan lalu lintas peredaran produk pangan dan non pangan.
5. Kurangnya keterisian data dan informasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Permasalahan yang terjadi antar lain yaitu:
- a. Belum optimalnya peran Badan Publik dan PPID dalam memberikan layanan informasi publik;
 - b. Terbatasnya keterisian data dan informasi yang disajikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Peningkatan kualitas SDM penyedia data dan informasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka **isu-isu strategis** yang menjadi prioritas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun di tahun 2014–2019 adalah:

“Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun.”

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi akan diarahkan, sehingga dalam hal ini Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun dalam menyelenggarakan tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah, dengan menetapkan :

| | |
|---------------|---|
| VISI : | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sinergis di wilayah kerja Bakorwil Madiun |
|---------------|---|

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Terwujudnya koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait akan mengarahkan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditentukan dan mencegah adanya simpang siur dan tumpang tindih kegiatan sehingga peran dan tugas pokok Bakorwil Madiun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan terlaksana dengan baik, sinergis, tepat, cepat, lancar, efektif dan efisien.

2. Misi

Misi adalah suatu usaha untuk mewujudkan tercapainya sebuah Visi sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik, maka Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun menetapkan :

| | |
|--------------|--|
| MISI: | Meningkatkan hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun |
|--------------|--|

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu adanya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang bersih dan profesionalisme pelayanan publik sehingga dapat tercipta sinergitas, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Madiun.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, adapun tujuan yang dimaksud yaitu :

"Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun."

2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

"Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun."

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|--|---|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun | Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | 55% | 80% | 85% | 90% | 95% |

4.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun selama ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain tidak dimilikinya aksesibilitas hirarki secara langsung dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) secara kualitatif maupun kuantitatif, maka dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan SKPD sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun strategi dan kebijakan Bakorwil Madiun adalah sebagai berikut:

Strategi:

“Meningkatkan hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Bakorwil Madiun.”

Kebijakan:

“Peningkatan jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti.”

Penentuan Strategi

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Strategi |
|-----|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | Meningkatkan hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Bakorwil Madiun |

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sinergis | | | |
|--|--|--|--|
| MISI : Meningkatkan hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun | Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun | Meningkatkan hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah | Peningkatan jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti |

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan, maka untuk mencapainya harus ada langkah yang dilakukan yaitu melalui program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada setiap program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Bakorwil Madiun.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi SKPD. Kegiatan juga merupakan aspek operasional dari suatu Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi visi, misi, sasaran dan tujuan SKPD.

Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Renstra.

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan pembangunan Madiun mengarahkan program prioritas wajib yaitu Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan 6 (enam) program dan 15 kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Rencana Program

Rencana Program tahun 2014-2019 sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 5) Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- 6) Program Pengembangan Data Informasi.

2. Kegiatan

Rencana Kegiatan tahun 2014-2019 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana;
- 4) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;
- 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 6) Penyusunan Dokumen Perencanaan;
- 7) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran;
- 8) Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data;
- 9) Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan;
- 10) Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi;
- 11) Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan;
- 12) Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana;
- 13) Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah;
- 14) Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur;
- 15) Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Bakorwil Madiun

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--|--|---|-------------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD | | | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 1. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun | Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | 1 20 01 | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor | 77% | 80% | 1.322.516.215 | 83% | 360.700.000 | 86% | 378.735.000 | 89% | 397.675.000 | 92% | 417.559.000 | 92% | 2.877.185.215 | Bakorwil Madiun | Madiun | | |
| | | | | 1 20 01 001 | a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran | 77% | 80% | 1.322.516.215 | 83% | 360.700.000 | 86% | 378.735.000 | 89% | 397.675.000 | 92% | 417.559.000 | 92% | 2.877.185.215 | Bakorwil Madiun | Madiun | |
| | | | | | | Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran | 90% | 93% | | 93% | | 93% | | 95% | 95% | | 95% | | | | | |
| | | | 1 20 02 | 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 77% | 80% | 628.587.117 | 83% | 1.374.900.000 | 86% | 1.443.645.000 | 89% | 1.515.827.000 | 92% | 1591619000 | 92% | 6.554.578.117 | Bakorwil Madiun | Madiun | | |
| | | | 1 20 02 001 | a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD | 77% | 80% | 251.434.000 | 83% | 638.200.000 | 86% | 670.110.000 | 89% | 703.615.000 | 92% | 738.796.000 | 92% | 3.002.155.000 | Bakorwil Madiun | Madiun | | |
| | | | 1 20 02 002 | b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara | 77% | 80% | 377.153.117 | 83% | 736.700.000 | 86% | 773.535.000 | 89% | 812.212.000 | 92% | 852.823.000 | 92% | 3.552.423.117 | Bakorwil Madiun | Madiun | | |
| | | | 1 20 07 | 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Persentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan | 77% | 100% | 158.167.748 | 100% | 485.000.000 | 100% | 509.250.000 | 100% | 534.705.000 | 100% | 561.445.000 | 100% | 2.248.567.748 | Bakorwil Madiun | Madiun | | |
| | | | 1 20 07 001 | a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku | 77% | 100% | 70.000.000 | 100% | 263.000.000 | 100% | 276.150.000 | 100% | 289.950.000 | 100% | 304.450.000 | 100% | 1.203.550.000 | Bakorwil Madiun | Madiun | | |
| | | | 1 20 07 002 | b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM | 60 | 60 | 88.167.748 | | 222.000.000 | 60 | 233.100.000 | 60 | 244.755.000 | 60 | 256.995.000 | 60 | 1.045.017.748 | Bakorwil Madiun | Madiun | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|---|--|------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1 | 20 | 11 | 4. | Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | 77% | 80% | 126.666.666 | 83% | 154.000.000 | 86% | 161.700.000 | 89% | 169.800.000 | 92% | 178.260.000 | 92% | 790.426.666 | Bakorwil Madiun | Madiun | |
| 1 | 20 | 11 | 001 | a. | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun | 4 | 4 | 54.666.666 | 4 | 61.000.000 | 4 | 64.050.000 | 4 | 67.250.000 | 4 | 70.610.000 | 4 | 317.576.666 | Bakorwil Madiun | Madiun |
| 1 | 20 | 11 | 002 | b. | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun | 22 | 22 | 57.000.000 | 22 | 60.000.000 | 22 | 63.000.000 | 22 | 66.150.000 | 22 | 69.450.000 | 22 | 315.600.000 | Bakorwil Madiun | Madiun |
| 1 | 20 | 11 | 003 | c. | Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data | Jumlah Update database SKPD | 4 | 4 | 15.000.000 | 4 | 33.000.000 | 4 | 34.650.000 | 4 | 36.400.000 | 4 | 38.200.000 | 4 | 157.250.000 | Bakorwil Madiun | Madiun |
| 1 | 20 | 96 | 1. | Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan : | Persentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti | 53% | 55% | 3.143.619.048 | 80% | 1.240.000.000 | 85% | 1.302.000.000 | 90% | 1.367.050.000 | 95% | 1.435.401.000 | 95% | 8.488.070.048 | Bakorwil Madiun | Madiun | |
| 1 | 20 | 96 | 001 | a. | Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti | 53% | 55% | 875.000.000 | 80% | 460.000.000 | 85% | 483.000.000 | 90% | 507.100.000 | 95% | 532.455.000 | 95% | 2.857.555.000 | Bakorwil Madiun | Madiun |
| 1 | 20 | 96 | 002 | b. | Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti | 53% | 55% | 718.619.048 | 80% | 260.000.000 | 85% | 273.000.000 | 90% | 286.650.000 | 95% | 300.982.000 | 95% | 1.839.251.048 | Bakorwil Madiun | Madiun |
| 1 | 20 | 96 | 003 | c. | Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | 53% | 55% | 750.000.000 | 80% | 260.000.000 | 85% | 273.000.000 | 90% | 286.650.000 | 95% | 300.982.000 | 95% | 1.870.632.000 | Bakorwil Madiun | Madiun |
| 1 | 20 | 96 | 004 | d. | Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti | 53% | 55% | 800.000.000 | 80% | 260.000.000 | 85% | 273.000.000 | 90% | 286.650.000 | 95% | 300.982.000 | 95% | 1.920.632.000 | Bakorwil Madiun | Madiun |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|--|---|-----|---|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|--------|
| 2. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan | Meningkatnya keterisian data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan | Prosentase (%) jumlah keterisian data dan informasi | 1 | 20 | 97 | 1. Program Pengembangan Data Informasi : | Prosentase (%) jumlah keterisian data dan informasi | 55% | 57% | 529.714.286 | 59% | 221.000.000 | 61% | 231.050.000 | 63% | 243.653.000 | 65% | 255.836.000 | 65% | 1.481.253.286 | Bakorwil Madiun | Madiun | | | |
| | | | 1 | 20 | 97 | | | 001 | a. Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah | Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah | 4 | 4 | 229.714.286 | 4 | 130.000.000 | 4 | 136.500.000 | 4 | 143.325.000 | 4 | 150.491.000 | 4 | 790.030.286 | Bakorwil Madiun | Madiun |
| | | | 1 | 20 | 97 | | | 002 | b. Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur | Jumlah update database SKPD | 3 | 3 | 100.000.000 | 3 | 28.000.000 | 3 | 28.400.000 | 3 | 30.870.000 | 3 | 32.414.000 | 3 | 219.684.000 | Bakorwil Madiun | Madiun |
| | | | 1 | 20 | 97 | | | 003 | c. Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi | Jumlah sinkronisasi, monitoring dan monitoring pengelolaan informasi dan dokumentasi | 3 | 3 | 200.000.000 | 3 | 63.000.000 | 3 | 66.150.000 | 3 | 69.458.000 | 3 | 72.931.000 | 3 | 471.539.000 | Bakorwil Madiun | Madiun |
| JUMLAH | | | | | | | | | 5.909.271.080 | | 3.835.600.000 | | 4.026.380.000 | | 4.228.710.000 | | 4.440.120.000 | | 22.440.081.080 | | | | | | |

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Bakorwil Madiun mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Jawa Timur Tahun 2014–2019 sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | | 54,5% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |

Indikator Kinerja Bakorwil Madiun:

Program Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan Indikator Kinerja yaitu:

“Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti”.

BAB VII

PENUTUP

Review Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) Bakorwil Madiun Tahun 2014–2019 merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan mendasar yang berorientasi pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019 dengan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan telah memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ kendala yang dihadapi organisasi.

Oleh karena itu Review Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2014–2019 agar dipergunakan sebagai pedoman dan diimplementasikan oleh jajaran Bakorwil Madiun dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya serta dijadikan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja Bakorwil Madiun.

Akhirnya sebagai kelanjutan penjabaran Review Renstra Bakorwil Madiun akan disusun rencana kegiatan/aksi (*action plan*) tahunan pada tahun-tahun berikutnya, dengan harapan bersama semoga dalam pelaksanaan tugas dapat memperoleh hasil yang optimal.